

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Laut China Selatan adalah kawasan perairan yang memiliki potensi yang sangat besar serta menjadi jalur utama bagi pelayaran dan menjadi sumber penangkapan ikan untuk orang dari berbagai negara yang berada di sekeliling Laut China Selatan (Roza, Muhamad, & Nainggolan, 2013). Perselisihan terkait Laut China Selatan dimulai sejak tahun 1947, saat China menerbitkan peta sebelas garis putus-putus dengan rincian klaim kedaulatan wilayah, klaim tersebut meliputi Kepulauan Pratas, Tepi Macclesfield serta Kepulauan *Paracel* dan *Spratly* yang termasuk dalam wilayah China (CFR, 2025). Tetapi Vietnam membantah pernyataan tersebut karena China tidak pernah mengklaim kedaulatan atas kedua pulau itu hingga tahun 1940-an (BBC, 2011).

Tidak hanya pada tahun 1947 China mengeluarkan peta klaimnya, tapi pada tahun 1953 China juga menerbitkan peta yang menunjukkan *nine das line* di Laut China Selatan merupakan milik China. Selain China, kawasan ini juga diklaim oleh Filipina, yang berargumen bahwa secara geografis pulau tersebut dekat dengan negaranya. Oleh karena hal tersebut kawasan Laut China Selatan diperebutkan oleh beberapa negara meliputi negara Brunei Darussalam, China, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Vietnam. Perebutan kawasan Laut China Selatan menimbulkan adanya konflik karena adanya kepentingan nasional akan potensi yang sangat besar di kawasan tersebut dan adanya klaim yang dilakukan oleh setiap negara yang terlibat (BBC, 2011).

China mengklaim bahwa Laut China Selatan merupakan hak China khususnya kawasan Kepulauan *Spartly* dan Paracel termasuk juga *nine dash line*, tetapi klaim China tidak sesuai dengan klaim Filipina serta negara lain yang terlibat. Atas klaim yang dilakukan oleh China pada seluruh kawasan Laut China Selatan menimbulkan konflik antara negara China dengan negara di ASEAN terlebih Filipina. Hubungan antara Filipina dengan China kurang baik karena perebutan kawasan Laut China Selatan. Oleh karena itu menyebabkan adanya Sengketa Laut China Selatan terjadi antara Filipina dan China, dikarenakan adanya klaim yang tumpang tindih atas perebutan kawasan kepulauan *Spartly* dan pulau *Scarborough Shoal* (BBC NEWS, 2023).

Untuk mengatasi Sengketa Laut China Selatan setiap Presiden Filipina memiliki kebijakan yang berbeda, khususnya pada pemerintahan Rodrigo Duterte mengalami perubahan kebijakan yang berbeda dari masa pemerintahan sebelumnya. Selama periode kepemimpinan Benigno Aquino III, Filipina lebih condong untuk menjalin kedekatan dengan negara Sekutu yakni Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri Filipina pada pemerintahan Benigno relatif konfrontatif terhadap China serta memperkuat aliansi militer dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi sekutu utama Filipina dalam hal keamanan, dan dianggap sebagai mitra yang tepat untuk menanggapi ancaman dari China. Pada pemerintahan Benigno Aquino III hubungan antara Filipina dan Amerika Serikat sangat erat karena merupakan negara sekutu. Filipina dan Amerika Serikat telah memiliki Perjanjian terkait pertahanan dari tahun 1951, dan kemudian pada pemerintahan Benigno Aquino III terdapat perjanjian baru yakni *The Enhanced Defense*

*Cooperation Agreement* (EDCA). Perjanjian EDCA diciptakan untuk meningkatkan kehadiran militer Amerika Serikat di Filipina sehingga Filipina dan Amerika Serikat melakukan patroli maritim di Laut China Selatan. Perjanjian EDCA juga merupakan strategi dalam pertahanan serta keamanan Filipina untuk melindungi hak kedaulatan atas wilayah maritim dan berfungsi sebagai pencegah terhadap ancaman keamanan dari luar seperti dari China (Chang, 2023).

Selama masa pemerintahan Presiden Benigno Aquino III, Filipina mengadopsi kebijakan yang lebih konfrontatif, terlihat dalam keputusan untuk membawa sengketa Laut China Selatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional (*Permanent Court of Arbitration*). Mahkamah Arbitrase kemudian mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa Filipina memiliki hak eksklusif atas Laut China Selatan dan tindakan China, seperti pembangunan pulau buatan serta eksplorasi minyak, melanggar kedaulatan Filipina (BBC NEWS, 2023). Keluarnya keputusan dari Mahkamah Arbitrase Internasional, pihak China tidak menerima keputusan yang telah dikeluarkan oleh karena itu China tetap memperjuangkan kawasan yang telah diklaim China (Green, 2016).

Mahkamah Arbitrase Internasional juga menyatakan *nine dash-line* China tidak diakui oleh Hukum Internasional dan China tidak memiliki hak atas Laut China Selatan, hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh China merupakan eksploitasi yang terjadi di Laut China Selatan dan merupakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional sesuai dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) (Panda, 2016).

Pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte kebijakan luar negeri Filipina mengalami perubahan. Dimana Duterte mengadopsi kebijakan luar negeri *Independent Foreign Policy*, kebijakan ini dibuat untuk melindungi kepentingan nasional Filipina serta dengan adanya kebijakan ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. *Independent Foreign Policy* memiliki tiga karakteristik yang perlu diperhatikan, yang pertama yakni kepentingan nasional serta kesetaraan hubungan merupakan landasan utama dalam membuat kebijakan luar negeri. Yang kedua, tidak ada ketergantungan terhadap material yang didapatkan dari kekuatan asing dan bertugas untuk melindungi swadaya ekonomi nasional serta warisan nasional. Yang ketiga, melakukan implementasi yang memiliki tujuan untuk menjaga kehormatan dan kedaulatan yang tidak terpengaruh karena adanya ancaman dari kekuatan asing (Villacorta, 1989).

Menurut pandangan Duterte solusi yang akurat untuk sengketa Laut China Selatan adalah kolaborasi dengan China untuk memanfaatkan potensi yang terdapat pada Laut China Selatan. Tindakan ini juga bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antara kedua negara. Filipina juga tidak menghasut kegiatan China di Laut China Selatan (Gomez, 2016). Duterte memilih arah kebijakan yang lebih pragmatis dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan (Cervantes, 2018). Duterte memilih dengan menggunakan cara damai untuk penyelesaian atas sengketa Laut China Selatan, dengan mengedepankan perdamaian, menjalin hubungan bilateral dengan cara negosiasi dan diplomasi.

China memberikan respon yang positif dan memberikan dukungan pada pemerintahan Filipina atas cara yang diberikan oleh Duterte. Hal ini dapat dilihat

berdasarkan pembuktian oleh Duterte melalui ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara *Philippine Coast Guard* (PCG) dan *China Coast Guard* (CCG) di Beijing, China pada Oktober 2016, MoU antara dua negara tersebut menjadikan adanya kerja sama bilateral yang dibawah oleh *Joint Coast Guard Committee on Maritime Cooperation* (JCGC). Respon dari pemerintah Filipina atas diubahnya kebijakan luar negeri Filipina yakni tetap berkomitmen dalam penyelesaian isu ini dengan cara damai (PCG, 2017).

Pada penyelesaian konflik ini Rodrigo Duterte tidak ingin melibatkan pengadilan internasional, melalui hal ini membawa perubahan dalam kebijakan luar negeri Filipina. Dari kebijakan yang telah ada sebelumnya Filipina merupakan negara yang berpegang kepada peran Presiden yang membuat keputusan dan kebijakan. Pada pemerintahan Rodrigo Duterte Filipina memasuki fase yang baru dalam kebijakan luar negerinya, dengan tujuan dari kebijakan Duterte yang lebih mementingkan kepentingan nasional dan mengarah pada kesejahteraan rakyat. Mewujudkan hubungan yang baik dengan China merupakan salah satu kebijakan yang diusungkan oleh Duterte dan mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat.

Pada *Philippines-China Trade and Investment Forum* atau sebuah forum bisnis di Great Hall of The People pada tahun 2016 di Beijing Duterte mengatakan bahwa ingin memisahkan diri dari Amerika Serikat secara militer tetapi tidak secara sosial dan ekonomi, pernyataan dari Duterte ditegaskan oleh Abella sebagai juru bicara Presiden bahwa pernyataan Duterte merupakan penegasan kembali untuk mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat dan menyeimbangkan

hubungan ekonomi dan militer dengan negara-negara tetangga di Asia seperti China (Morales, 2016). Mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat merupakan kebijakan yang berbanding terbalik dengan masa pemerintahan Filipina sebelumnya. Kebijakan Duterte melakukan pendekatan dengan China dan menyelesaikan sengketa Laut China Selatan secara damai. Dengan melakukan negosiasi dengan China meyakini bahwa negosiasi adalah cara untuk menghindari konflik. Langkah ini diambil karena Presiden Filipina menyadari ketidakmampuan negaranya dalam bertempur melawan China dan karena Presiden Duterte lebih memprioritaskan peningkatan hubungan perdagangan dan ekonomi dengan China. Terdapat niat untuk memperkuat hubungan bilateral dengan China, Presiden Duterte lebih memilih untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara lain daripada harus berkonflik dengan negara lain yang hanya akan mengakibatkan kerugian besar bagi kedua belah pihak (BBC, 2016).

**Tabel 1. 1 Tabel Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Filipina**

<b>Aspek</b>	<b>Pemerintahan Benigno Aquino 2010-2016</b>	<b>Pemerintahan Rodrigo Duterte 2016-2022</b>
<b>Geopolitik</b>	Lebih berorientasi ke blok Barat, terutama Amerika Serikat	Lebih menerapkan kebijakan luar negeri yang pragmatis, menjalin hubungan dengan China
<b>Prioritas</b>	Menjaga kedaulatan wilayah dan keamanan nasional dari ancaman China di Laut China Selatan	Meningkatkan pertumbuhan dan hubungan diplomatik dengan China untuk mendukung pembangunan domestik
<b>Ekonomi</b>	Menjaga keamanan ekonomi dari China dan lebih mengandalkan sekutu Barat	Menjalinkan Kerja sama dengan China

<b>Kebijakan Internasional</b>	Kebijakan internasional yang berbasis hukum dan aliansi strategis Barat	Kebijakan yang <i>independent</i> dan pragmatisme serta menekankan keuntungan ekonomi
--------------------------------	---	---

*Sumber: Analisis penulis dari berbagai sumber*

Melalui tabel diatas dapat dilihat perbedaan kebijakan luar negeri Filipina terkait Sengketa Laut China Selatan pada pemerintahan Benigno Aquino III (2010-2016) dan pada pemerintahan Rodrigo Duterte (2016-2022).

Karena itu penelitian ini ingin melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte terkait Sengketa Laut China Selatan, baik dari aspek domestik dan aspek internasional untuk memahami terjadinya perubahan arah kebijakan luar negeri Filipina dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait topik serupa yakni penelitian yang berjudul Analisis Kebijakan Luar Negeri Filipina Terkait Sengketa Laut China Selatan Pada Masa Duterte oleh Shintia Ramadani dan Sofia Trisni (2019). Penelitian tersebut menjelaskan gambaran dan analisis dalam proses perubahan kebijakan luar negeri Filipina untuk menerapkan perubahan kebijakan yang bersifat kooperatif pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte yang dianalisis menggunakan *Rational Choice* oleh Charles Kegley dan Shanon Blanton. Pada penelitian ini membahas aktor pembuat kebijakan terutama Rodrigo Duterte yang telah didukung oleh Senat dengan tujuan perubahan kebijakan yang mempertahankan kebijakan ekonomi dan keamanan nasional secara maksimal,

serta keluarnya kebijakan yang bersifat kooperatif untuk menghadapi agresivitas China (Ramadani & Trisni, 2019).

Penelitian berikutnya yang berjudul Kebijakan Politik Luar Negeri Filipina Tentang Laut China Selatan Pada Masa Pemerintahan Rodrigo Duterte oleh Jennifer Beatrice G. P (2020). Penelitian ini membahas perubahan kebijakan luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte dari yang konfrontatif menjadi kooperatif dalam mengatasi Sengketa Laut China Selatan, perubahan kebijakan tersebut memiliki fokus pada kepentingan ekonomi dan kestabilan wilayah dengan menjalin hubungan baik dan Kerja sama dengan China serta mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat. Pendekatan yang dilakukan bertujuan memperkuat posisi nasional Filipina dengan cara yang efektif, menguntungkan serta mendukung pembangunan infrastruktur (BEATRICE, 2020).

Selain itu penelitian yang berjudul Perubahan Sikap Luar Negeri Filipina terhadap China di Laut Cina Selatan Pada Masa Rodrigo Duterte oleh Mitta Diahawani dan Peni Hanggarini (2025). Penelitian ini membahas bagaimana dibentuk dan dilaksanakannya kebijakan luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte yang berdampak pada kepentingan nasional Filipina di laut China Selatan yang dianalisis menggunakan pendekatan Model Aktor Rasional oleh Graham T. Allison. Perubahan kebijakan luar negeri Filipina yang dilakukan oleh Rodrigo Duterte sebagai aktor utama menggunakan strategi yang pragmatis dan bersifat kooperatif, mendahulukan cara damai dengan cara dialog bilateral serta kerja sama ekonomi antara Filipina dan China (Diahawani & Hanggarini, 2025).

Berdasarkan dari tinjauan literatur di atas, terdapat gap penelitian belum ada yang menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte terkait Sengketa Laut China Selatan dengan menggunakan teori *Foreign Policy Change* oleh Joakim Eidenfalk. Dengan ini, penulis menggunakan teori *Foreign Policy Change* oleh Eidenfalk untuk menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte terkait Sengketa Laut China Selatan (2016-2022).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka munculah rumusan masalah yang mendasari penelitian ini dibuat yakni, “Mengapa terjadi perubahan kebijakan luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte terkait Sengketa Laut China Selatan?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Secara Umum**

Secara umum penelitian ini dilakukan dengan tujuan umum untuk memberikan kontribusi terhadap Studi Hubungan Internasional khususnya pada konteks kebijakan luar negeri. Penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan gelar Sarjana (S1) Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### **1.3.2 Secara Khusus**

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perubahan kebijakan luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte: Studi kasus Sengketa Laut China Selatan (2016-2022).

## **1.4 Kerangka Teori**

### **1.4.1 Theory Foreign Policy Change**

Kebijakan luar negeri merupakan serangkaian strategi serta tindakan yang diterapkan oleh suatu negara dengan tujuan untuk berinteraksi dengan negara lain. Kalevi Holsti menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri bukan hanya sebagai suatu tindakan diplomatik tunggal akan tetapi serangkaian keputusan atau tindakan yang saling berkaitan untuk mengatur relasi negara dengan negara lainnya. Kebijakan luar negeri adalah hasil dari proses yang terencana yang akan dilakukan dan diterapkan oleh pemerintah (Holsti, 1992). Perubahan dalam kebijakan luar negeri dapat memiliki dampak besar pada hubungan masa depan suatu negara dengan dunia atau dengan aktor-aktor tertentu. *Foreign Policy Change* yang dikembangkan oleh Joakim Eidenfalk menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri adalah sebuah proses yang kompleks serta dipengaruhi oleh berbagai faktor domestik dan faktor internasional (Eidenfalk, 2006).

Perubahan kebijakan luar negeri mencakup variabel independen dan variabel dependen, variabel independen terbagi menjadi sumber perubahan domestik dan internasional yang memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan untuk kebijakan luar negeri. Proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negeri perlu

untuk mempertimbangkan *source of change* (sumber perubahan) baik dari faktor domestik ataupun faktor internasional (Eidenfalk, 2006). Faktor domestik memiliki peran penting dalam menekan dan mempengaruhi pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan luar negeri, sumber perubahan domestic dapat diidentifikasi melalui birokrasi, opini publik, media, kelompok kepentingan, dan partai politik dan faktor internasional dapat diidentifikasi melalui faktor global, faktor regional, hubungan bilateral dan aktor non-negara (Eidenfalk, 2006).

Birokrasi secara tradisional dapat dipandang sebagai sumber stabilitas daripada sebagai sumber perubahan, sifat birokrasi cenderung lamban yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam membuat dan menerapkan perubahan kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2006). Tetapi pada pernyataan Hermann dalam modelnya birokrasi memiliki peran penting dan efektif dalam mengadvokasi perubahan kebijakan luar negeri serta Hermann menyatakan birokrasi merupakan sumber perubahan (Hermann C. F., 1990). Opini publik memiliki peran yang penting karena melalui opini publik pemerintah memerlukan dukungan yang cukup banyak untuk melakukan dan menerapkan perubahan kebijakan luar negeri. Opini publik juga penting karena memberikan dukungan untuk kelompok kepentingan serta aktor sosial lainnya dalam mempengaruhi keputusan pemerintah, opini public bukan hanya sebagai sumber dukungan bagi pemerintah tetapi juga sebagai sumber perubahan untuk mencapai perubahan kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2006).

Media adalah jembatan antara pemerintah dan publik karena pembuat kebijakan memerlukan pertimbangan terhadap media jika ingin mendapatkan dukungan untuk melakukan perubahan kebijakan (Malek & Wiegand, 1997). Media

juga memiliki beberapa fungsi dalam mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri yakni dapat menjadi faktor yang penting dalam menetapkan agenda serta membentuk opini publik, sebagai penyedia informasi yang berasal dari pemerintah kepada publik, sebagai penyedia informasi bagi pemerintah dan bagi publik serta sebagai forum untuk berbagai pihak. Media dapat mempengaruhi isu kebijakan secara signifikan dengan mendukung atau mengecam suatu perubahan kebijakan, sehingga dapat menjadi tekanan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan dan mempengaruhi opini publik (Eidenfalk, 2006).

Kelompok kepentingan dalam teori *Foreign Policy Change* oleh Eidenfalk mengacu pada definisi dari John W. Dietrich yang menjelaskannya sebagai sebuah asosiasi terorganisir yang terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan keputusan pemerintah. Asosiasi ini mencakup kelompok-kelompok yang dibentuk oleh warga negara, yang diorganisir berdasarkan isu tertentu, serta lobi profesional, bisnis, dan firma hukum kepentingan publik (Dietrich, 1999). Kelompok kepentingan juga dapat mempengaruhi kebijakan serta dapat menarik perhatian pemilih tetapi tidak menjamin keberhasilan pengaruh serta globalisasi yang semakin meningkat menjadikan kelompok kepentingan memiliki daya tawar dan pengaruh yang meningkat (Dietrich, 1999). Sumber perubahan domestik yang terakhir yaitu partai politik, partai politik merujuk pada partai parlemen, partai politik sebagai wadah kepentingan serta orientasi kebijakan tertentu yang menjadi penghubung antara pemilih dan pemerintah. Selain itu partai oposisi juga merupakan kategori yang menjadi faktor dalam membentuk kebijakan (Eidenfalk, 2006).

Selain sumber perubahan domestik terdapat juga sumber perubahan internasional, dalam hal ini politik internasional adalah sistem yang kompleks terdiri dari negara-negara, lembaga serta aktor non-negara yang saling mempengaruhi dalam setiap tingkatan. Pada sumber perubahan internasional pada faktor pertama yakni faktor global, faktor global memiliki fokus pada perubahan sistem politik internasional yang mempunyai dampak global serta mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Yang kedua yaitu faktor regional, lembaga regional atau yang terdiri atas negara-negara memiliki dampak yang signifikan dalam pembuatan dan penerapan perubahan kebijakan luar negeri suatu negara, selain itu diperlukannya untuk mempertimbangkan norma yang ada di wilayah tertentu dalam pembuatan kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2006).

Yang ketiga yakni hubungan bilateral, dalam hal ini diperlukannya mempertimbangkan hubungan bilateral pemerintah dengan aktor lain, umumnya yang terlibat adalah negara-negara tetapi dapat juga mencakup lembaga global ataupun lembaga regional. Hubungan bilateral dapat mempengaruhi negara lain untuk menekan agar mengadopsi kebijakan luar negeri yang disesuaikan atau dapat berbeda. Yang terakhir yaitu aktor non-negara, aktor non-negara memiliki peran dalam membentuk serta mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Aktor non-negara tidak dapat diabaikan karena dapat membawa pengaruh serta kekuatan yang signifikan dalam isu-isu tertentu walaupun negara sebagai aktor utama dalam sistem politik internasional (Eidenfalk, 2006).

### **1.4.2 Window of Opportunity**

*Window of opportunity* atau jendela peluang merupakan sumber perubahan yang harus dilewati supaya dapat menjadi pengaruh dalam pengambilan keputusan yang akan menyebabkan perubahan kebijakan luar negeri, dalam hal ini pemangku keputusan harus mengetahui jendela peluang baik dari tekanan ataupun sumber-sumber perubahan maupun menyadari bahwa adanya peluang atau kesempatan untuk mendorong perubahan kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2006). Dalam hal ini pemangku keputusan juga harus mempertimbangkan peluang yang menguntungkan dalam melakukan perubahan kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2006).

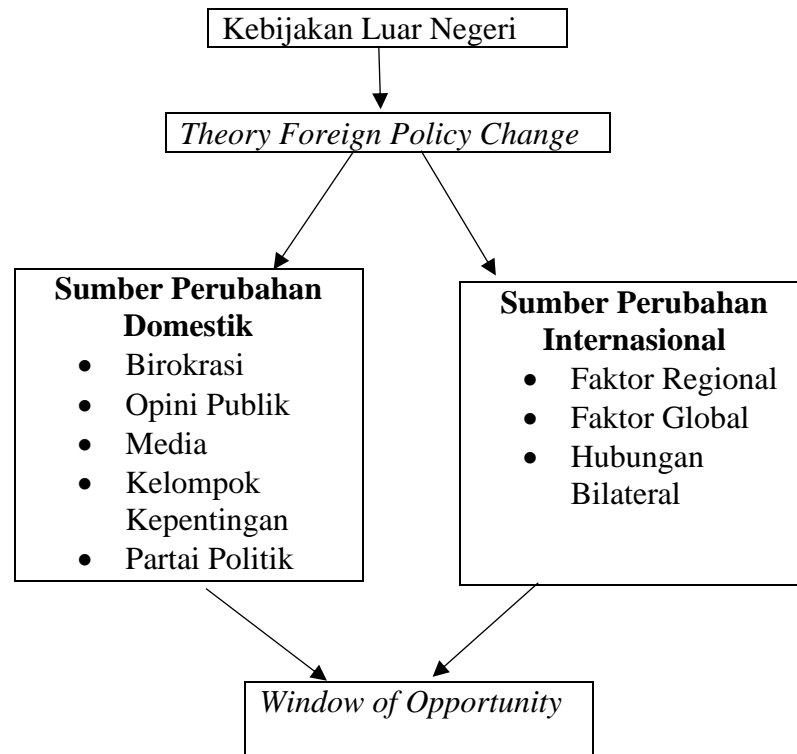
Pemangku keputusan dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, Margaret G. Hermann menemukan enam jenis karakteristik pribadi dalam pemimpin politik (Hermann M. G., 1980). Enam jenis karakteristik tersebut adalah yang pertama keyakinan, keyakinan merujuk pada asumsi dasar seorang pemimpin politik yang dapat mempengaruhi interpretasi pemimpin dalam lingkungannya. Yang kedua yakni motif, motif merujuk pada apa yang dilakukan oleh pemimpin dalam kebutuhannya. Yang ketiga adalah gaya pengambilan keputusan, hal ini merujuk pada cara yang disukai oleh pemimpin dalam pengambilan keputusan (Hermann M. G., 1980).

Yang keempat, gaya interpersonal yang merujuk pada bagaimana pemimpin politik berinteraksi dengan sesama pembuat kebijakan, Hermann menyebutkan ada dua karakteristik yang menonjol yakni paranonia atau kecurigaan berlebih dan machiavellianisme atau perilaku tidak bermoral dan manipulatif. Yang kelima adalah pelatihan dalam urusan luar negeri yang merujuk pada pengalaman

pemimpin dalam kebijakan luar negeri. Yang keenam yakni minat terhadap urusan luar negeri yang mengacu pada minat pemimpin terhadap kebijakan luar negeri yang akan mempengaruhi tingkat partisipasi pemimpin dalam urusan luar negeri (Hermann M. G., 1980).

Pada *Window of Opportunity* (jendela peluang) terdapat dua skenario yang dapat menyebabkan berubahnya kebijakan luar negeri. Pada Skenario satu adanya perubahan kondisi struktural yang menyebabkan adanya pengaruh atau tekanan dari sumber perubahan, hal tersebut dapat dijadikan peluang untuk mengubah kebijakan luar negeri oleh pemangku keputusan. Pada skenario dua dimulai dari pemangku keputusan menjalankan agenda sendiri dengan menunggu kesempatan yang tepat dan jendela kesempatan kemudian diperhatikan serta ditindaklanjuti oleh pemangku keputusan sehingga digunakan untuk mendorong agendanya dan akan mengarahkan pada perubahan kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2009).

## 1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 1 Sintesa Pemikiran (Sumber: Penulis)

Berdasarkan sintesa pemikiran diatas penulis ingin menjelaskan apa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Filipina menggunakan teori *Foreign Policy Change* oleh Eidenfalk. Teori ini menjelaskan bahwa ada dua sumber perubahan yakni, sumber perubahan Domestik dan sumber perubahan Internasional. Sumber perubahan domestik terdiri dari birokrasi, opini publik, media, kelompok kepentingan serta partai politik dan sumber perubahan internasional terdiri dari faktor global, faktor regional, hubungan bilateral serta aktor non-negara. Dari sumber perubahan yang ada pemangku keputusan dapat mempertimbangkan *window of opportunity* yang muncul dan memutuskan perubahan kebijakan luar negeri yang akan diterapkan.

## 1.6 Argumen Utama

Kebijakan luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte mengalami perubahan dari kebijakan konfrontatif menjadi kebijakan yang pragmatis dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan yang dianalisis menggunakan teori *Foreign Policy Change* oleh Eidenfalk. Sumber perubahan domestik yang pertama yakni birokrasi, dalam birokrasi terdapat *Department of Foreign Affairs* (DFA) membantu memberikan saran untuk mengutamakan diplomasi dan melakukan dialog bilateral dengan China serta Senat Filipina sebagai pengawas dalam proses perubahan kebijakan luar negeri. Yang kedua yakni opini publik, opini publik lebih ingin kebijakan luar negeri Filipina pada pemerintahan Duterte lebih tegas terhadap China dan mempertahankan putusan dari PCA. Yang ketiga yakni media, dalam mempromosikan kebijakan luar negerinya Duterte menggunakan media konvensional yang meliputi *Philippine News Agency* (PNA) yang menyampaikan pernyataan mendukung pembuat kebijakan dengan pendekatan pragmatis serta diplomatik dalam sengketa Laut China Selatan.

Yang keempat yakni kelompok kepentingan, terdapat kelompok bisnis yang mendorong pemerintah mengambil kebijakan yang memberikan manfaat ekonomi seperti investasi dan peluang dagang. Yang kelima yakni partai politik, Partai PDP-Laban (partai politik Duterte) mendukung perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Duterte dan memfasilitasi arah kebijakan luar negerinya. Sumber perubahan internasional yang pertama faktor global, terdapat rivalitas China dengan Amerika Serikat di Laut China Selatan mencerminkan persaingan geopolitik dua kekuatan besar dalam mempertahankan pengaruh strategis di kawasan Indo-Pasifik yang memengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Filipina, yang kedua faktor regional,

terdapat ASEAN yang membuat Filipina mempertimbangkan stabilitas wilayah sebagai bagian dari kebijakan luar negeri. Yang ketiga yakni hubungan bilateral terdapat Filipina-China dan Filipina-Amerika Serikat yang memengaruhi bagaimana Filipina memformulasikan kebijakan luar negerinya.

Putusan dari *Permanent Court of Arbitration* (PCA) menjadi momentum yang muncul sehingga Duterte memanfaatkan peluang tersebut untuk mengubah kebijakan luar negeri Filipina terkait sengketa Laut China Selatan. Enam karakteristik personal pemimpin mengarahkan perubahan kebijakan luar negeri yang pertama, keyakinan Duterte adalah menilai kepentingan ekonomi, stabilitas dan pragmatis, yang kedua motif dari Duterte kebutuhan akan kekuasaan, afiliasi, serta pengakuan. Yang ketiga gaya pengambilan keputusan Duterte bersifat pragmatis, berhati-hati dan sentralisme, yang keempat, gaya interpersonal Duterte realistis-pragmatis yang berorientasi pada kepentingan nasional. Yang kelima pelatihan formalnya dalam urusan luar negeri terbatas karena fokus kariernya di politik lokal dan yang ke enam Duterte memiliki minat tinggi pada isu luar negeri, terutama strategi dan ekonomi.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe eksplanatif. Penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan alasan terjadinya fenomena atau peristiwa. Penelitian eksplanatif berdasar pada pertanyaan mengapa yang akan menjelaskan terjadinya suatu peristiwa, ada beberapa faktor yang yang menentukan kemampuan eksplanatif

yakni kesederhanaan struktur, kecemasan penjelasan serta relevansi terhadap fenomena sosial yang berbeda-beda (Gulo, 2002). Penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatif untuk menjelaskan mengapa serta faktor-faktor Rodrigo Duterte mengubah kebijakan luar negeri Filipina terkait sengketa Laut China Selatan.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Penelitian dengan judul Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Filipina pada Masa Pemerintahan Rodrigo Duterte : Studi Kasus Sengketa Laut China Selatan (2016 - 2022) berfokus pada menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri Filipina yang dilakukan oleh Rodrigo Duterte. Periode yang dipilih oleh penulis yakni 2016-2022, karena pada Februari 2016 merupakan awal masa kampanye Duterte serta pada Juni 2016 dimulainya masa jabatan Rodrigo Duterte sebagai Presiden Filipina yang melakukan perubahan kebijakan luar negeri Filipina yang berbeda dengan pemerintahan Filipina sebelumnya. Penulis memilih tahun 2022 sebagai batas akhir jangkauan penelitian karena berakhirnya masa jabatan Duterte sebagai Presiden Filipina.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Menurut Marzali studi pustaka adalah teknik mencari literasi dalam bentuk membaca pada jurnal-jurnal sebelumnya serta menelaah berbagai *web*, jurnal, buku, berita, dan berbagai pustaka lainnya yang berkaitan

dengan topik yang penulis tulis (Marzali, 2017). Pengumpulan data dilakukan melalui situs web berita elektronik, jurnal ilmiah.

#### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memberi gambaran objek yang terperinci tentang kondisi suatu permasalahan dari objek penelitian. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara memeriksa seluruh informasi yang tertulis dari media massa. Tujuan dari analisis data kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu permasalahan secara sistematis realistis secara rinci terhadap penelitian yang sedang diteliti (Bungin, 2008). Penulis bertujuan untuk melakukan eksplorasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Filipina yang dilakukan oleh Rodrigo Duterte.

#### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

BAB 1: berisi mengenai pendahuluan yang didalamnya mencakup pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, sintesa pemikiran, argument utama dan metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta sistematika penulisan.

BAB 2: menganalisis sumber perubahan domestik dan sumber perubahan internasional yang menjadi faktor-faktor berubahnya kebijakan luar negeri Filipina terkait Sengketa Laut China Selatan

BAB 3: menganalisis *window of opportunity* terkait perubahan kebijakan luar negeri Filipina terhadap Sengketa Laut China Selatan

BAB 4: bagian ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.